



## Menganalisis Keberhasilan Provinsi Kepulauan Riau Pasca Pemekaran Daerah di Bidang Ekonomi dan Infrastruktur

Aisyah Aisyah<sup>1\*</sup>, Ajeng Aprianingsih<sup>2</sup>, Desma Tri Anggriani<sup>3</sup>, Sofianto Sofianto<sup>4</sup>,  
Sutrajat Sutrajat<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup>Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Korespondensi penulis: [aisyah687904@gmail.com](mailto:aisyah687904@gmail.com) \*

**Abstract.** *This study analyzes the success of the Riau Islands Province post-regional expansion in the fields of economy and infrastructure. The territorial expansion carried out in 2002 aimed to enhance government efficiency and accelerate regional development. Despite notable progress, such as economic growth exceeding the national average and controlled inflation, significant challenges remain, including dependency on transfers from the central government. The Fiscal Independence Index (IKF) indicates that most districts and cities in Riau Islands Province are still categorized as "Not Independent." Therefore, a comprehensive strategy is needed to increase Regional Original Income (PAD) and strengthen fiscal decentralization. The method used in this study is literature review, which involves examining and analyzing written sources such as books, articles, and academic journals. Through this method, researchers can gather relevant information and understand the context and developments in the studied field. This research also provides policy recommendations to enhance community participation in decision-making, aiming for more effective regional autonomy. Thus, this study is expected to contribute to the literature on regional expansion and local government policies in Indonesia.*

**Keywords:** *Riau Islands Province, regional expansion, economy and infrastructure*

**Abstrak.** Penelitian ini menganalisis keberhasilan Provinsi Kepulauan Riau pasca pemekaran daerah dalam bidang ekonomi dan infrastruktur. Pemekaran wilayah yang dilakukan pada tahun 2002 bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dan mempercepat pembangunan daerah. Meskipun terdapat kemajuan, seperti pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dibandingkan rata-rata nasional dan pengendalian inflasi, masih ada tantangan signifikan yang dihadapi, termasuk ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten dan kota di Provinsi Kepri masih dalam kategori "Belum Mandiri." Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperkuat desentralisasi fiskal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, yang melibatkan penelaahan dan analisis terhadap sumber-sumber tertulis, seperti buku, artikel, dan jurnal ilmiah. Melalui metode ini, peneliti dapat mengumpulkan informasi yang relevan dan memahami konteks serta perkembangan dalam bidang yang diteliti. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, guna mencapai otonomi daerah yang lebih efektif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi literatur mengenai pemekaran wilayah dan kebijakan pemerintahan daerah di Indonesia.

**Kata kunci:** Provinsi Kepulauan Riau, Pemekaran daerah, ekonomi dan infrastruktur

### 1. LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari daerah provinsi. Setiap provinsi terdiri dari kabupaten atau kota, yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah sendiri. mulai tanggal Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, yang sekarang diubah melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengubah perspektif tentang pemerintahan dari yang tersentralisasi menjadi yang terdesentralisasi. Sebagai Negara Kesatuan, Republik Indonesia menggunakan prinsip desentralisasi untuk menjalankan pemerintahan dan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada setiap wilayah untuk mengembangkan demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan mereka

sendiri. Pembentukan daerah dapat berupa pembagian satu daerah menjadi dua daerah atau lebih, penggabungan bagian daerah yang bersandingan, atau penggabungan beberapa daerah (Nugroho et al., 2023).

Indonesia telah melakukan reformasi tata pemerintahan sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berlaku. Hakekat dari undang-undang tersebut adalah bahwa pemerintah memberikan beberapa fungsi pusat kepada pemerintah daerah, selain memberikan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus keuangan negara mereka sendiri . Otonomi daerah muncul dari ide pendistribusian kekuasaan secara politik dan bertujuan untuk mewujudkan demokrasi dengan mengembalikan hal - hal dasar kepada masyarakat di daerah. Otonomi daerah juga berarti memberikan tugas dan tanggung jawab administratif kepada pemerintah daerah dan mendekatkan pemerintah daerah kepada rakyat sebagai pemilik hak atau kekuasaan (Syuaib & Pandipa, 2022).

Setelah dilakukan pemekaran daerah di indonesia, ada beberapa daerah yang melakukan pemekaran daerahnya. Salah satunya, Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dibentuk setelah Provinsi Riau terpecah pada tanggal 24 September 2002 dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002. Mengingat lokasinya yang strategis dan sumber daya alam yang melimpah, pemekaran ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dan mempercepat pembangunan daerah. Kepri adalah provinsi ke-32 di Indonesia, dengan Kota Tanjungpinang dan Kota Batam di antara beberapa kabupaten lainnya (PemProv Kepri, 2023).

Dengan pemekaran daerah di Provinsi Kepri ini, Perkembangan ekonomi dan infrastruktur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sangat dipengaruhi oleh pemekaran wilayah. Banyak daerah yang hasil pemekarannya masih bergantung pada "dana transfer" dari pemerintah pusat. Menurut data, Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) Kepri berada di angka 0,60 pada triwulan I 2024, menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten dan kota di Provinsi Kepri masih berada dalam kategori "Belum Mandiri" atau "Menuju Kemandirian" dalam hal kemandirian fiskal. Mereka yang dianggap sebagai "Mandiri" hanyalah Kota Batam dan Kabupaten Karimun. Mengingat tujuan utama pemekaran adalah untuk meningkatkan kemampuan daerah untuk membiayai layanan publik secara mandiri, ketergantungan ini menghalangi daerah untuk mencapai kemandirian fiskal yang lebih baik (Gunawan, 2024).

Untuk meningkatkan kemandirian fiskal, penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Selain itu, desentralisasi fiskal yang lebih luas dapat membantu memperkuat kewenangan daerah dalam memungut pajak dan retribusi daerah, sehingga Pendapatan Asli

Daerah (PAD) dapat meningkat dan lebih independen dari transfer pusat (Gunawan, 2024). Namun, data IKF I dan II menunjukkan bahwa meskipun Kota Batam dan Kabupaten Karimun telah mencapai klasifikasi "Mandiri", mayoritas kabupaten/kota lainnya masih berada dalam tahapan "Menuju Kemandirian". Oleh karena itu, perlu strategi yang komprehensif untuk meningkatkan PAD dan mengurangi ketergantungan pada transfer pusat, sehingga tujuan otonomi daerah dapat tercapai secara maksimal. (Gunawan, 2024).

Salah satu keberhasilan yang dapat dicatat adalah pertumbuhan ekonomi Kepri yang lebih baik dibandingkan rata-rata nasional. Pemerintah daerah berhasil mengendalikan inflasi dengan angka 2,46 persen pada Oktober 2023, lebih rendah dari inflasi nasional yang mencapai 2,56 persen<sup>2</sup>. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mengelola perekonomian lokal meskipun masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Di sisi lain, tantangan infrastruktur juga menjadi perhatian utama pasca pemekaran. Konektivitas antar pulau di Kepri perlu ditingkatkan agar memudahkan aksesibilitas dan distribusi barang serta jasa. Pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh kabupaten dan kota sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan juga menjadi faktor penting. Program-program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan diharapkan dapat memperkuat otonomi daerah. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, pemerintah daerah dapat lebih memahami kebutuhan dan aspirasi warga. Dalam konteks kebijakan fiskal, perluasan desentralisasi fiskal menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih giat dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi. Hal ini sejalan dengan tujuan pemekaran yang ingin menjadikan daerah lebih mandiri secara ekonomi. Secara keseluruhan, meskipun Provinsi Kepri telah menunjukkan beberapa kemajuan pasca pemekaran, tantangan-tantangan yang ada masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta partisipasi aktif masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Riau (Gunawan, 2024).

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk memberikan kontribusi bagi literatur tentang pemekaran wilayah di Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan pasca pemekaran. Hal ini penting agar tujuan awal pemekaran dapat tercapai, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih baik (Mailendra,

2009). Penelitian ini juga akan memberikan kontribusi pada literatur mengenai pemekaran daerah di Kepulauan Riau, khususnya dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Dalam menganalisis keberhasilan Provinsi Kepulauan Riau pasca pemekaran daerah di bidang ekonomi, beberapa teori ekonomi yang relevan dapat dijadikan landasan. Pertama, Teori Pertumbuhan Ekonomi yang dikemukakan oleh Adam Smith dan diperluas oleh teori Keynesian menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti investasi, pengeluaran pemerintah, dan tenaga kerja. Teori ini menekankan pentingnya intervensi pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur dan layanan publik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (Hasibuan, 2022).

Kedua, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator kesejahteraan masyarakat juga menjadi fokus dalam analisis ini. IPM mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan pendapatan yang berkontribusi terhadap kualitas hidup masyarakat. Peningkatan IPM di Provinsi Kepri menunjukkan adanya kemajuan dalam pembangunan manusia, meskipun masih terdapat disparitas antara kabupaten/kota (Suryana et al., 2018). Oleh karena itu, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM perlu dieksplorasi lebih lanjut untuk memahami dampak pemekaran daerah (Gunawan, 2024).

Ketiga, Desentralisasi Fiskal merupakan konsep penting dalam konteks otonomi daerah. Desentralisasi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan keuangan secara mandiri. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Dalam konteks Provinsi Kepri, tantangan dalam mencapai kemandirian fiskal harus diperhatikan agar tujuan pemekaran dapat tercapai secara optimal (Gunawan, 2024).

## **3. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam artikel ini yaitu menggunakan metode studi literatur. Studi Literatur adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan penelaahan dan analisis terhadap sumber-sumber tertulis seperti buku, artikel, dan jurnal ilmiah. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik penelitian serta membantu peneliti memahami konteks dan perkembangan dalam bidang yang diteliti. Melalui metode literatur, peneliti dapat memperoleh ide-ide baru, menemukan kebaruan penelitian, menyusun kerangka teori yang mendukung penelitian, serta memperkuat argumen dengan bukti dari literatur yang ada (Sjafei, 2022).

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Desentralisasi**

Desentralisasi dan otonomi daerah di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) merupakan aspek penting dalam pengelolaan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Sejak terbentuknya Provinsi Kepri pada tanggal 24 September 2002 melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002, daerah ini berupaya mengelola sumber daya dan urusan pemerintahan secara mandiri, sesuai dengan prinsip-prinsip pemberitaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Provinsi Kepulauan Riau terbentuk sebagai hasil dari pemekaran wilayah dari Provinsi Riau. Proses pemekaran ini didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah yang memiliki karakteristik geografis kepulauan yang unik. Dengan luas wilayah sekitar 8.201,72 km<sup>2</sup> dan terdiri dari 5 kabupaten serta 2 kota. Selain itu, keinginan komunitas lokal untuk pemerintah yang lebih dekat dan responsif mendorong pembentukan provinsi ini. Dalam situasi seperti ini, desentralisasi sangat penting untuk memberikan otonomi daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat lokal (Purwanto, 2023). Desentralisasi di Indonesia bertujuan untuk memangkas jarak kendali antara pemerintah pusat dan daerah. Akibatnya, daerah memiliki kewenangan lebih dalam untuk mengambil keputusan lokal. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Pasal 18 UUD 1945, yang menetapkan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia memberikan otonomi kepada provinsi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan mereka sendiri. Lucy, A.(2019)

### **Indeks Kebijakan Fiskal (IKF)**

Indeks kebijakan fiskal merupakan alat penting untuk menilai seberapa baik kebijakan pemerintah dalam menjalankan perekonomian, terutama di Provinsi Kepulauan Riau setelah pemekaran. Pengaturan pendapatan dan pengeluaran negara serta pengawasan pajak dan subsidi adalah bagian dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemandirian fiskal Kepri, yang saat ini bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat (Gunawan, 2024). Kemampuannya untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi merupakan komponen penting dari kebijakan fiskal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permintaan agregat dapat ditingkatkan dengan meningkatkan belanja pemerintah dan mengurangi pajak. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Meskipun perekonomian Kepri tumbuh lebih cepat daripada rata-rata nasional, masalah pengelolaan anggaran dan kemandirian pada transfer pusat masih

menjadi kendala untuk mencapai kemandirian fiskal (Nugroho et al., 2023). Kebijakan fiskal juga membantu menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Di Kepri, inflasi lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, menunjukkan bahwa pemerintah daerah mengelola perekonomian dengan baik meskipun masih menghadapi banyak tantangan struktural. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang tepat dapat membantu mewujudkan lingkungan ekonomi yang stabil dan mendukung investasi dan pertumbuhan dalam jangka panjang (PemProv Kepri, 2023). Selain itu, penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan kebijakan fiskal. Pemerintah daerah dapat lebih memahami kebutuhan dan keinginan warga serta membuat kebijakan yang lebih baik dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Oleh karena itu, keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Riau akan bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat (Mailendra, 2009).

### **Keberhasilan Di Bidang Ekonomi Pasca Pemekaran**

Pasca pemekaran, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengalami dinamika yang menarik. Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,09% pada tahun 2022, Produk Domestik Bruto (PDRB) Kepri mencapai Rp 308,84 triliun, dengan potensi yang signifikan dalam industri dan perdagangan. Industri pengolahan menyumbang 40,81% terhadap PDRB, diikuti oleh industri konstruksi (19,21%) dan perdagangan (19,21%). Pertumbuhan industri-industri ini menjadi ukuran penting untuk mengukur keberhasilan pemekaran daerah. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, laju pertumbuhan ekonomi Kepri telah berubah. Perekonomian Kepri tumbuh di atas rata-rata nasional dari tahun 2010 hingga 2016, tetapi turun dari tahun 2017 hingga 2022. Selain itu, indeks pembangunan manusia (IPM) Kepri menunjukkan tren positif yang membantu pertumbuhan ekonomi. IPM Kepri meningkat dari 71,13 pada tahun 2010 menjadi 76,46 pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan perbaikan kualitas kehidupan masyarakat, yang dapat mendorong investasi dan ekonomi lokal. Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi, mengingat harapan lama sekolah dan harapan hidup yang lebih baik (Nugroho et al., 2023).

Keberhasilan di bidang ekonomi setelah pemekaran Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada tahun 2002 terlihat melalui berbagai inisiatif yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu langkah strategisnya adalah pendirian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam, yang mencakup KEK Tanjung Sauh dan KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional. KEK Tanjung Sauh, misalnya, ditargetkan untuk menarik investasi sebesar Rp199,6 triliun dan menciptakan lebih dari 366.000 lapangan kerja hingga tahun 2053. Pertumbuhan ekonomi Batam juga menunjukkan hasil yang menggembirakan, dengan angka pertumbuhan mencapai

7,04% pada tahun 2023, didorong oleh sektor industri, perdagangan, dan pariwisata yang semakin berkembang berkat kebijakan otonomi daerah. Selain itu, potensi pariwisata Kepulauan Riau, khususnya di Pulau Bintan dan Batam, semakin dipromosikan dengan baik, menarik lebih banyak wisatawan domestik dan internasional (Antaraneews, 2024).

### **Keberhasilan Di Bidang Infrastruktur Pasca Pemekaran**

Keberhasilan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dalam bidang infrastruktur pasca-pemekaran pada tahun 2002 sangat signifikan, menimbulkan dampak positif yang luas bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pemekaran ini memberikan otonomi lebih kepada pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengimplementasikan proyek-proyek infrastruktur yang diperlukan, terutama dalam meningkatkan konektivitas antar pulau dan aksesibilitas layanan dasar bagi masyarakat. Salah satu langkah strategi yang diambil adalah pembangunan infrastruktur transportasi, termasuk jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara. Proyek-proyek ini menjadi prioritas utama untuk menghubungkan pulau-pulau yang tersebar di wilayah Kepri. Misalnya, pembangunan Bandara Internasional Hang Nadim di Batam telah meningkatkan konektivitas udara, memudahkan perjalanan bagi wisatawan domestik dan internasional serta mendukung pertumbuhan sektor pariwisata. Selain itu, pelabuhan-pelabuhan baru dan yang bercak di Karimun dan Natuna juga berkontribusi pada peningkatan distribusi barang dan mobilitas penduduk. Pemerintah pusat juga telah mengalokasikan dana yang signifikan untuk pembangunan infrastruktur dasar (Kepriprov, 2021).

Pada tahun 2023, dana instruksi presiden sebesar Rp 640 miliar dialokasikan untuk berbagai proyek infrastruktur di seluruh kabupaten/kota di Kepri. Dana ini digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan yang sangat dibutuhkan masyarakat, seperti Jalan Tanjung Buton-Klarik di Kabupaten Natuna dan berbagai ruas jalan lainnya yang mendukung aksesibilitas ke daerah terpencil. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Sauh di Batam merupakan contoh nyata dari keberhasilan pembangunan infrastruktur. KEK ini dirancang untuk menarik investasi besar dengan target mencapai Rp199,6 triliun hingga tahun 2053. Pembangunan KEK tidak hanya akan menciptakan lapangan kerja tetapi juga meningkatkan infrastruktur pendukung seperti jalan akses dan fasilitas logistik yang diperlukan untuk mendukung kegiatan industri. Upaya pemerintah dalam meningkatkan akses listrik dan air bersih juga menunjukkan keberhasilan yang signifikan. Program-program pembangunan fasilitas dasar ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan infrastruktur antara daerah perkotaan dan pedesaan. Dengan adanya akses listrik yang lebih baik, masyarakat di pulau-pulau kecil dapat menikmati layanan dasar yang lebih baik, sehingga meningkatkan kualitas

hidup mereka. Digitalisasi dan pengembangan jaringan telekomunikasi juga menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan infrastruktur di Kepri (Kepri.bpk, 2023).

Dengan memperluas jaringan telekomunikasi ke daerah-daerah terpencil, pemerintah berupaya mendukung sektor ekonomi digital dan pendidikan jarak jauh. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat mengakses informasi dan peluang pendidikan yang lebih baik. Pembangunan fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, dan pusat pelayanan masyarakat juga meningkat setelah pemekaran. Dengan adanya fasilitas-fasilitas ini, kualitas layanan kesehatan dan pendidikan di daerah semakin membaik. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat serta menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk pertumbuhan anak-anak dan generasi mendatang. Secara keseluruhan, keberhasilan Provinsi Kepulauan Riau dalam bidang infrastruktur pasca-pemekaran menunjukkan bagaimana otonomi daerah dapat dimanfaatkan untuk merencanakan dan melaksanakan strategi proyek-proyek yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan terus fokus pada pengembangan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan, Kepri berpotensi menjadi salah satu provinsi terdepan dalam hal konektivitas dan kualitas hidup di Indonesia (Mediacenter, 2023).

### **Tantangan Di Bidang Ekonomi dan Infrastruktur pada Pemekaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau**

Pasca pemekaran Provinsi Kepri, terdapat beberapa tantangan signifikan yang harus dihadapi dalam bidang ekonomi. Salah satu tantangan utama adalah kesiapan infrastruktur, yang masih belum optimal di beberapa wilayah seperti Kabupaten Lingga, Natuna, dan Kepulauan Anambas. Infrastruktur transportasi laut dan udara yang terbatas mengganggu konektivitas antarpulau, sehingga distribusi barang dan jasa menjadi lambat dan mahal. Selain itu, masih terdapat jalan/jembatan provinsi dalam kondisi rusak, yang memperlambat mobilitas dan meningkatkan biaya operasional (Ritonga, 2020).

Lemahnya infrastruktur pendukung konektivitas intra-provinsi kepulauan menyebabkan permasalahan distribusi yang kompleks. Harga input dan output menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain, sehingga memperlambat daya saing perdagangan antardaerah. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah harus mempercepat pembangunan infrastruktur yang mampu memperkuat konektivitas antarpulau, seperti infrastruktur pelabuhan, bandara perintis, dan jalan. Selain itu, evaluasi ulang kebijakan formulasi alokasi dana transfer juga diperlukan untuk memastikan distribusi sumber daya yang lebih adil dan efektif. Secara keseluruhan, meskipun pemekaran Provinsi Kepri membawa peluang strategis, tantangan ekonomi dan infrastrukturnya harus dihadapi dengan bijak. Strategi pembangunan

yang inklusif, investasi yang sistematis, dan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat sangat penting untuk meningkatkan standar pelayanan publik dan penguatan ekonomi daerah. Tanpa pendekatan yang komprehensif, pemekaran ini berisiko menambah masalah baru alih-alih menyelesaikan yang lama (Suryana, 2017).

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Kemajuan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dibandingkan rata-rata nasional, dengan tingkat inflasi yang berhasil dikendalikan pada angka 2,46% per Oktober 2023, lebih rendah dari inflasi nasional. Namun, ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat masih menjadi tantangan utama, dengan banyak kabupaten dan kota yang masih dalam kategori “Belum Mandiri” berdasarkan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF).

Pemekaran daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dan mempercepat pembangunan. Meskipun ada kemajuan, masih diperlukan upaya untuk memperkuat fiskal dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar daerah dapat mandiri secara finansial. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat penting untuk mencapai otonomi daerah yang efektif. Program pemberdayaan masyarakat perlu diperkuat untuk memenuhi kebutuhan lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

### **Saran**

1. Strategi Peningkatan PAD : Pemerintah daerah disarankan untuk mengembangkan strategi komprehensif dalam meningkatkan PAD melalui optimalisasi pajak dan retribusi, serta memperkuat pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.
2. Pembangunan Infrastruktur : Fokus pada peningkatan infrastruktur, terutama konektivitas antar pulau, sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan aksesibilitas layanan publik. Pembangunan yang merata di seluruh kabupaten dan kota harus menjadi prioritas.
3. Keterlibatan Masyarakat : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan akan membantu pemerintah memahami aspirasi warga dan menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.

4. Kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah : Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah perlu diperkuat untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Riau.

## DAFTAR REFERENSI

- Center, M. (2023, June 22). Rudi targetkan 2029 pembangunan infrastruktur selesai, Batam jadi kota maju dan modern. *Mediacenter Batam*. <https://mediacenter.batam.go.id/2023/06/22/rudi-targetkan-2029-pembangunan-infrastruktur-selesai-batam-jadi-kota-maju-dan-modern/>
- Gunawan, C. (2024). Mengukur tingkat kemandirian fiskal daerah di Provinsi Kepulauan Riau. *Gokepri*. <https://gokepri.com/mengukur-tingkat-kemandirian-fiskal-daerah-di-provinsi-kepulauan-riau/>
- Gunawan, R. (2024). Tantangan kemandirian fiskal di Provinsi Kepulauan Riau pasca pemekaran daerah.
- Hasibuan, I. M. (2022). *Faktor penentu angka pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau* (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan).
- Kepri, P. (2021, July). Ansar tetap prioritas pembangunan infrastruktur di Kepri. *Portal Website OPD Pemprov Kepri*. <https://kepriprov.go.id/berita/pemprov-kepri/ansar-tetap-prioritas-pembangunan-infrastruktur-di-kepri>
- Kepri, P. (2023, September). Siklus pertumbuhan ekonomi Kepri terus meningkat, dari fase pemulihan menuju fase peningkatan. *Portal Website OPD Pemprov Kepri*. <https://kepriprov.go.id/berita/gubernur/siklus-pertumbuhan-ekonomi-kepri-terus-meningkat-dari-fase-pemulihan-menusju-fase-peningkatan>
- Lucy, A. (2019). *Perencanaan dan pengendalian ketercapaian visi Ke-3 “Berakhlak Mulia” Provinsi Kepulauan Riau* (Doctoral dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji).
- Makasil, V., Lengkong, F. D., & Kiyai, B. (2020). Pengaruh implementasi kebijakan pemekaran wilayah terhadap peningkatan pelayanan publik di Desa Apeng Sembeka Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(92).
- Nugroho, A., Jumanah, J., & Haetami, H. (2023). Analisis cost and benefit implementasi kebijakan pemekaran daerah di Indonesia. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 9(1).
- Purwanto, A. (2023). Provinsi Kepulauan Riau: Strategis dan kaya sumber daya alam. *Kompas*. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/daerah/provinsi-kepulauan-riau>
- RI, B. (2023). Kepri dapat dana Inpres Rp 640 miliar, Ansar alokasikan ke infrastruktur. *BPK Kepri*. <https://kepri.bpk.go.id/kepri-dapat-dana-inpres-rp-640-miliar-ansar-alokasikan-ke-infrastruktur/>
- Ritonga, F. S. (2020). Pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau. *TANSIQ: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 3(1).

- Saputra, B. (2024). Pemerintah menargetkan realisasi investasi KEK Tanjung Sauh Rp 199,6 T. *Antara Kantor Berita Indonesia*.  
<https://www.antaraneews.com/berita/4149924/pemerintah-menargetkan-realisisi-investasi-kek-tanjung-sauh-rp1996-t>
- Silalahi, S. A. F., & Sudarwati, Y. (2018). *Pembangunan daerah kepulauan: Studi kasus Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Maluku Utara*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sjafei, H. (2022). Metode penelitian studi literatur, apa itu? *Kompas Buku*.  
<https://buku.kompas.com/read/2051/metode-penelitian-studi-literatur-apa-itu>
- Syuaib, M. R. (2021). Implementasi kebijakan pemekaran kecamatan dalam pelayanan publik di Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 17(1), 34-40.